



BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

1. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksanaan Urusan Wajib.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan pagu anggaran didalam DPA dan DPPA tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 39.844.083.563,00 dan yang terserap dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 38.076.411.728,00 atau prosentase capaian target 95,56 %, sisa anggaran sebesar 4,44 % seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Jawa Barat.

- Akuntabilitas keuangan daerah terhadap belanja langsung rencana anggaran belanja sebesar Rp. 22.212.774.400,00 realisasi belanja terserap Rp. 21.432.095.261,00 atau prosentase capaian target sebesar 96,48 %.
- Akuntabilitas keuangan daerah terhadap belanja tidak langsung (Gaji & Tunjangan) rencana belanja Rp. 17.631.309.163,00 realisasi terserap Rp. 16.644.346.467,00 atau prosentase capaian target sebesar 94,40 %.

Anggaran belanja dan realisasi anggaran diperuntukkan pada pelaksanaan 5 (lima) bidang urusan wajib yaitu sebagai berikut :

No.	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Presentasi Capaian Kinerja
			Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal			
	Total APBD	17.631.309.163	305.900.000	20.690.441.150	1.216.433.250	39.844.083.563	38.076.411.728	95,56
I	Bidang Penanaman Modal							
1	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi		186.200.000	5.075.097.000	-	5.261.297.000	5.060.914.050	96,19
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN		2.300.000	461.920.000	-	464.220.000	455.688.000	98,16
	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal di Jawa Barat		2.300.000	415.700.000	-	418.000.000	393.512.000	94,14
	Pelaksanaan Kerjasama Investasi		102.200.000	819.487.000	-	921.687.000	907.575.500	98,46
	Pengembangan Penanaman Modal		52.600.000	425.110.000	-	477.710.000	463.923.250	99,30
	Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi		22.000.000	2.557.680.000	-	2.579.680.000	2.448.247.800	94,91
	Publikasi Kawasan Geopark Ciletuh		4.800.000	395.200.000	-	400.000.000	391.967.500	97,99
II	Bidang Statistik							
2	Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah		-	496.700.000	-	496.700.000	462.570.000	93,12
	Pengelolaan Data/Informasi dan Publikasi Perizinan/Non Perizinan di Jawa Barat		-	496.700.000	-	496.700.000	462.570.000	93,12



No.	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Presentasi Capaian Kinerja
			Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal			
	Total APBD	17.631.309.163	305.900.000	20.690.441.150	1.216.433.250	39.844.083.563	38.076.411.728	95,56
III Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian								
3	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah		19.300.000	4.530.224.000	-	4.549.524.400	4.463.511.252	98,10
	Penyelenggaraan Verifikasi/Validasi, Visitasi Lapangan dan Administrasi/Teknis Perizinan		-	2.485.000.000	-	2.485.000.000	2.485.000.000	99,17
	Pemantapan Kebijakan dan Sinergitas Stakeholders Perizinan		6.900.000	396.950.000	-	403.850.000	385.007.127	95,33
	Penyelenggaraan Layanan Perizinan melalui SMS dan Gerai Wilayah Barat		-	194.320.000	-	194.320.000	193.645.000	99,00
	Penyelenggaraan Layanan Perizinan melalui SMS dan Gerai Wilayah Timur		-	194.549.000	-	194.549.000	192.662.000	99,03
	Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu Jawa Barat		2.000.000	209.805.000	-	211.805.400	188.249.000	88,88
	Sosialisasi Pelayanan Perizinan di Jawa Barat		10.400.000	1.049.600.000	-	1.060.000.000	1.018.948.125	96,13
4	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur		6.900.000	482.915.000	-	489.815.000	474.492.200	96,87
	Peningkatan Kemampuan Aparatur pada BPMPT		6.900.000	482.915.000	-	489.815.000	474.492.200	96,87
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur		7.600.000	729.365.000	-	736.965.000	728.652.811	98,87
	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur		7.600.000	729.365.000	-	736.965.000	728.652.811	98,87
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		24.800.000	6.011.614.750	-	6.036.414.750	5.772.296.612	95,62
	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran		24.800.000	6.011.614.750	-	6.036.414.750	5.772.296.612	95,62
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		15.300.000	103.500.000	1.216.433.250	1.335.233.250	1.227.603.277	91,94
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		15.300.000	103.500.000	1.216.433.250	1.335.233.250	1.227.603.277	91,94
8	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		124.584.000	4.582.640.000	-	4.707.224.000	4.469.558.466	94,95
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		124.584.000	4.582.640.000	-	4.707.224.000	4.469.558.466	94,95
9	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah		-	94.000.000	-	94.000.000	88.343.300	93,98
	Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah		-	94.000.000	-	94.000.000	88.343.300	93,98
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	95.000.000	-	95.000.000	95.000.000	100
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	95.000.000	-	95.000.000	95.000.000	100
IV Bidang Komunikasi dan Informatika								
11	Program Pengembangan Komunikasi, informasi, media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi		5.400.000	158.200.000	-	163.600.000	158.700.000	97,00
	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan		5.400.000	158.200.000	-	163.600.000	158.700.000	97,00
V Bidang Perencanaan Pembangunan								
12	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		33.600.000	886.400.000	-	920.000.000	915.292.000	99,49



No.	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Presentasi Capaian Kinerja
			Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal			
	Total APBD	17.631.309.163	305.900.000	20.690.441.150	1.216.433.250	39.844.083.563	38.076.411.728	95,56
	Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan		33.600.000	886.400.000	-	920.000.000	915.292.000	99,49

2. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksanaan Urusan Pilihan

Pelaksanaan urusan pilihan di lingkup BPMPT tidak ada.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana.

SKPD Pelaksana adalah BPMPT Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah kekuatan 133 orang.

Sebagaimana yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, bahwa penyelenggaraan urusan wajib pada bidang penanaman modal oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat yang merupakan sebagai OPD utama dalam meningkatnya jumlah investasi dan sebagai OPD mitra pendukung dalam meningkatnya jumlah lapangan kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan perijinan terpadu. Serta sebagai OPD mitra pendukung berperan meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan melalui urusan wajib Bidang Perencanaan Pembangunan. Selain itu BPMPT Provinsi Jawa Barat sebagai OPD mitra pendukung berperan dalam meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui urusan wajib bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Dalam pelaksanaan **Misi 1 BPMPT** Provinsi Jawa Barat, yaitu Meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat, berada pada urusan wajib di Bidang Penanaman Modal, serta didukung oleh urusan wajib bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dan didukung urusan wajib bidang Komunikasi dan Informatika serta urusan wajib bidang Statistik.

Keterkaitan antara misi BPMPT dengan misi Provinsi Jawa Barat dan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat, adalah **Misi kedua Jawa Barat** yaitu **Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan**, yang kewenangannya



berada pada wajib bidang penanaman modal/investasi. **Hal ini** untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. **Misi Ketiga Jawa Barat** yaitu ***meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik***, yang kewenangannya berada pada urusan wajib di Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) serta menerapkan model pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis Kabupaten/Kota dengan manajemen lintas Kabupaten/Kota.

Keterkaitan lainnya yaitu dalam **Common Goals** yang menjadi harapan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yaitu Common Goals Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Common Goals Peningkatan Kinerja Aparatur.

Selain menjadi OPD utama, tugas BPMPT ini juga sebagai OPD Mitra Pendukung, dalam hal ini BPMPT Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas untuk pendudukan dalam meningkatnya lapangan kerja sehingga tercapainya Common Goals tersebut. **Common Goals ini terfokus** pada Pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dan berdaya saing dalam angka peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui prinsip masyarakat bekerja, yang mempunyai sasaran Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi.

Sedangkan keterkaitan **Common Goals Peningkatan Kinerja Aparatur** merupakan tugas OPD Mitra Pendukung yaitu BPMPT Provinsi Jawa Barat ikut serta berperan dalam meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui **misi kedua BPMPT Provinsi Jawa Barat " Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan "** sebagai penjabaran untuk mewujudkan **misi ketiga** Provinsi Jawa Barat



"**meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik**". Dalam hal ini BPMPT Provinsi Jawa Barat sebagai OPD Mitra Pendukung yang mempunyai tugas untuk pendudukan tercapainya Common Goals tersebut. **Common Goals ini terfokus** pada Peningkatan pelayanan publik dan implementasi sistem renumerasi daerah yang berkeadilan serta menerapkan sistem *good governance* secara konsisten, Yang didukung oleh kualitas dan pengelolaan data dan informasi yang akurat dan akuntabel dalam kerangka satu data untuk pembangunan Jawa Barat, yang mempunyai sasaran :

- Terlaksananya reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, peningkatan kesejahteraan aparatur dan optimalisasi layanan pengadaan secara elektronik serta penggunaan teknologi informasi dalam manajemen administrasi layanan pemerintahan sebagai bagian dalam Jabar Cyber Provice yang mengedepankan Jabar Cyber Services;
- Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan, kearsipan dan penyelenggaraan daerah yang akuntabel.

B. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan

Prioritas urusan wajib yang dilaksanakan oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat yaitu pada urusan wajib bidang penanaman modal dan otonomi daerah, sedangkan urusan wajib lainnya merupakan pendukung tercapainya penyelenggaraan urusan wajib bidang penanaman modal dan otonomi daerah.

Prioritas urusan wajib bidang penanaman modal dilaksanakan untuk pencapaian tujuan bersama Common Goals Peningkatan Daya beli Masyarakat (CG 3) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 35 tahun 2014 tentang RKPD tahun 2015, sebagai berikut :

- Fokus : Pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dan berdaya saing dalam angka peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui prinsip masyarakat bekerja.
- Sasaran : Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi.
- Kegiatan Tematik 2 : Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi



Misi kesatu :

1) Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Prioritas pembangunan daerah mendukung pencapaian **Common Goals "Peningkatan Kinerja Aparatur"**, dilaksanakan melalui kebijakan dan program-program sebagai berikut :

Kebijakan :

a) Kebijakan Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan untuk mewujudkan clean government and good governance, yang dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut :

1. Program Pemantapan Otonomi Daerah
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

b) Kebijakan Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

2) Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi, informasi, media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi

3) Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan

Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah

Misi Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima :

4) Bidang Penanaman Modal

Prioritas pembangunan daerah terhadap pencapaian **Common Goals "Peningkatan Daya Beli Masyarakat"** dilaksanakan melalui kebijakan dan program-program sebagai berikut:



Kebijakan :

- a) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru, membentuk lembaga investasi dan forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi yang dilaksanakan melalui **Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi.**

5) Bidang Statistik.

Prioritas pembangunan daerah mendukung pencapaian **Common Goals kelima "Peningkatan Kinerja Aparatur"**, dilaksanakan melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

Kebijakan :

Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, yang dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.**

Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh BPMPT Provinsi pada Tahun Anggaran 2016 terdapat 12 (dua belas) program yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan.

1.1. Program dan Kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan dimaksud sebagai berikut :

Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal :

1. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi , dengan 6 (enam) Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN
 - b) Penanganan Permasalahan Penanaman Modal di Jawa Barat
 - c) Pelaksanaan Kerjasama Investasi
 - d) Pengembangan Penanaman Modal
 - e) Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - f) Publikasi Kawasan Geopark Ciletuh

Urusan wajib Bidang Statistik

2. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan 1 (satu) Kegiatan :



- a) Pengelolaan Data/Informasi dan Publikasi Perizinan/Non Perizinan di Jawa Barat.

Urusan wajib Bidang Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

3. Program Pemantapan Otonomi Daerah, dengan 5 (lima) kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Penyelenggaraan Verifikasi/Validasi, Visitasi Lapangan dan Administrasi/Teknis Perizinan.
 - b) Pemantapan Kebijakan dan Sinergitas Stakeholders Perizinan.
 - c) Penyelenggaraan Layanan Perizinan melalui SMS dan Gerai Wilayah Barat.
 - d) Penyelenggaraan Layanan Perizinan melalui SMS dan Gerai Wilayah Timur.
 - e) Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu Jawa Barat.
 - f) Sosialisasi Pelayanan Perizinan di Jawa Barat
4. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan :
 - a) Peningkatan Kemampuan Aparatur pada BPMPT
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, dengan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
9. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dengan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :



- a) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

- 11. Program Pengembangan Komunikasi, informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan satu kegiatan :
 - a) Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan

Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan

- 12. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan :
 - a) Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Tingkat standar pelayanan minimal didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan sebagai berikut :

Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal

1. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi

Bertujuan untuk meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi yang kondusif untuk menunjang kualitas perekonomian regional dalam mempertahankan kinerja pembangunan investasi dan menumbuhkan daya tarik investasi yang berdaya saing, dengan *sasaran program* yaitu :

- a. Terwujudnya harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung investasi di daerah.
- b. Terfasilitasinya jaminan keamanan dan kepastian hukum.
- c. Meningkatnya pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat.
- d. Terfasilitasinya pemberian fasilitas penanaman modal bagi penanam modal.
- e. Terbentuknya forum interaksi investor mitra Jawa Barat (West Java Partner)
- f. Meningkatnya promosi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait di Jawa Barat
- g. Tersusunnya paket peluang investasi yang layak untuk ditawarkan kepada penanam modal.



- h. Meningkatnya kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan swasta

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program tersebut :

1.1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 464.220.000,00, telah direalisasikan sebesar Rp. 455.688.000,00 atau sekitar 98,16 % yang terserap.

Output :

Terlaksananya pembinaan dan pengendalian perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat, terlaksananya *Task Force* penanganan permasalahan PMA/PMDN di Jawa Barat, terlaksananya penilaian perusahaan dan pembina PMA/PMDN terbaik di Jawa Barat

Outcome :

Meningkatnya iklim investasi dan peningkatan daya saing Jawa Barat.

Capaian Kinerja :

- a. Kinerja Sasaran Strategik

Meningkatnya iklim investasi dalam peningkatan daya saing dengan capaian kinerja 90 %, dengan makna **baik**.

- b. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN, capaian kinerja sebesar 90 %.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	2.300.000	1.800.000	78,26
2	Belanja Barang dan Jasa	461.920.000	453.888.000	98,26
	JUMLAH	464.220.000	455.688.000	98,16



Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja outcome 90 %, yang mempunyai makna **baik**.

Permasalahan dan solusi :

Tidak ada.

1.2. Kegiatan Penanganan Permasalahan Penanaman Modal di Jawa Barat

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 418.000.000,00 yang direalisasikan sebesar Rp. 393.512.000,00 dengan realisasi belanja sebesar 94,14 %.

Output :

Terlaksananya forum permasalahan penanaman modal, dan terlaksananya pembuatan aplikasi pengaduan permasalahan pelaksanaan penanaman modal.

Outcome :

Terselesaikannya permasalahan penanganan penanaman modal di Jawa Barat.

Capaian Kinerja :

a. Kinerja Sasaran Strategik

Terselesaikannya permasalahan penanganan penanaman modal di Jawa Barat dengan capaian kinerja 90 %, dengan makna **baik**.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Penanganan Permasalahan Penanaman Modal di Jawa Barat, ditunjukkan dari Rencana Belanja sebesar Rp. 418.000.000,00 Realisasi Belanja sebesar Rp. 393.512.000,00 capaian kinerja pengelolaan keuangan sebesar 94,14%.



NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	2.300.000	1.800.000	78,26
2	Belanja Barang dan Jasa	415.700.000	391.712.000	94,22
	JUMLAH	418.000.000	393.512.000	94,14

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja outcome 90 %, yang mempunyai makna baik.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.

1.4. Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Investasi

Kegiatan ini dengan alokasi dana APBD, sebesar Rp. 921.687.000,00 yang direalisasikan sebesar Rp. 907.575.500,00 atau realisasi belanja 98,46%.

Output :

Terlaksananya kegiatan kerjasama investasi, tersusunnya bahan promosi investasi kerjasama dua provinsi (Jabar dan Kaltim).

Outcome :

Terjalinnnya kerjasama investasi dengan Provinsi lain.

Capaian Kinerja :

a. Kinerja Sasaran Strategik

Pencapaian kinerja sasaran strategik terjalinnnya kerjasama investasi dengan Provinsi lain menghasilkan capaian Kinerja sebesar 100 % yang mempunyai makna **Baik**, ditandai dengan :

- Terlaksananya kegiatan kerjasama investasi, tersusunnya bahan promosi investasi kerjasama 2 Provinsi (Jabar dan Kaltim), capaian kinerja sebesar 100% dengan makna **baik**.

**b. Kinerja Pengelolaan Keuangan**

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Investasi, capaian kinerja sebesar 100 %.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	102.200.000	102.200.000	100
2	Belanja Barang dan Jasa	819.487.000	805.375.500	98,27
	JUMLAH	921.687.000	907.575.500	98,46

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja outcome 100 %, yang mempunyai makna **baik**.

Permasalahan dan solusi :

Tidak ada.

1.5. Kegiatan Pengembangan Penanaman Modal

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 477.710.000,00 yang direalisasikan sebesar Rp. 463.923.250,00 dengan realisasi belanja sebesar 99,3%.

Output :

Terlaksananya forum koordinasi kebijakan penanaman modal dan tersusunnya peluang investasi Jawa Barat.

Outcome :

Meningkatnya iklim investasi di Jawa Barat.

**Capaian Kinerja :**

a. Kinerja Sasaran Strategik

Pencapaian kinerja sasaran strategik meningkatnya iklim investasi di Jawa Barat, ditandai dengan :

- Terlaksananya forum koordinasi kebijakan penanaman modal, Capaian kinerja 100%, yang mempunyai makna **baik**.
- Tersusunnya peluang investasi di Jawa Barat, Capaian kinerja 100%, yang mempunyai makna **baik**.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Penanaman Modal, ditunjukkan dari Rencana Belanja sebesar Rp. 477.710.000,00 Realisasi Belanja sebesar Rp. 463.923.250,00 capaian kinerja pengelolaan keuangan sebesar 99,3%.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	52.600.000	52.600.000	100
2	Belanja Barang dan Jasa	425.110.000	411.323.250	96,75
	JUMLAH	477.710.000	463.923.250	99,3

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja outcome 100 %, yang mempunyai makna baik.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.



1.6. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.579.680.000,00, yang direalisasikan sebesar Rp. 2.448.247.800,00 atau realisasi belanja sebesar 94,91%.

Output :

Terlaksananya partisipasi Jawa Barat pada event Pameran Kalimantan, *Business Forum*, *West Java Investment Business Forum*, *Sister Province* dengan Australia Selatan, Promosi di Eropa, Pameran De'Syukron, Film *West Java in Brief*, dan Operasionalisasi Jawa Barat Center di Batam.

Outcome :

Tersampainya informasi potensi investasi Jawa Barat kepada calon investor di dalam maupun luar negeri, *opinion makers* dan *stakeholders* lainnya; meningkatnya minat investasi di Jawa Barat.

Capaian Kinerja :

a) Kinerja Sasaran Strategik

Pencapaian kinerja sasaran strategik terinformasikannya peluang investasi Jawa Barat kepada Investor Potensi di Dalam dan Luar Negeri, ditandai dengan meningkatnya minat investasi di Jawa Barat.

b) Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Fasilitas Koordinasi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi, capaian kinerja sebesar 90 %.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	22.000.000	15.900.000	72,27
2	Belanja Barang dan Jasa	2.557.680.000	2.432.347.800	95,10
	JUMLAH	2.579.680.000	2.448.247.800	94,91



Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja outcome 90 %, yang mempunyai makna **baik**.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.

1.7. Kegiatan Publikasi Kawasan Geopark Ciletuh

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00, yang direalisasikan sebesar Rp. 391.967.500,00 atau realisasi belanja sebesar 97,99%.

Output :

Terlaksananya publikasi kawasan Geopark Ciletuh.

Outcome :

Meningkatnya iklim investasi dalam peningkatan daya saing di Jawa Barat.

Capaian Kinerja :

a) Kinerja Sasaran Strategik

Terlaksananya publikasi kawasan Geopark Ciletuh, sehingga berdampak pada peningkatan iklim investasi di Jawa Barat.

b) Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan di Jawa Barat, capaian kinerja sebesar 100 %.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	4.800.000	4.800.000	100
2	Belanja Barang dan Jasa	395.200.000	387.167.500	97,96
	JUMLAH	400.000.000	391.967.500	97,99



Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja outcome 100 %, yang mempunyai makna **baik**.

Permasalahan dan solusi :

Jadwal kegiatan yang masih belum pasti terutama kegiatan promosi yang dilaksanakan BKPM RI sehingga menyulitkan dalam pengalokasian anggaran, solusi yang dilakukan dengan terus melakukan koordinasi dengan BKPM RI mengenai perubahan jadwal promosi.

Urusan wajib Bidang Statistik

2. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Bertujuan untuk meningkatnya iklim minat investasi dan realisasi investasi. dengan **sasaran program** yaitu :

Terpenuhinya data/informasi statistik daerah yang valid dan akuntabel untuk menunjang pembangunan daerah.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program tersebut :

2.1. Kegiatan Pengelolaan Data/Informasi dan Publikasi Perizinan/Non Perizinan di Jawa Barat

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 496.700.000,00, yang direalisasikan sebesar Rp. 462.570.000,00 dengan realisasi belanja sebesar 93,12%.

Output :

Terlaksananya identifikasi perkembangan perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten/Kota di Jawa Barat, terlaksananya pengumpulan data minat dan realisasi investasi PMA/PMDN di Jawa Barat.

Outcome

Tercapainya target realisasi investasi berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Capaian Kinerja :

a. Kinerja Sasaran Strategik

Pencapaian kinerja sasaran strategik tercapainya realisasi investasi, ditandai dengan teridentifikasinya perkembangan perusahaan



PMA/PMDN di Kabupaten/Kota di Jawa Barat, terlaksananya pengumpulan data minat dan realisasi investasi PMA/PMDN di Jawa Barat.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan Pengelolaan data/informasi dan publikasi perijinan/non perijinan di Jawa Barat yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan, capaian kinerja Pengelolaan Keuangan sebesar 93,12%.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang dan Jasa	496.700.000	462.570.000	93,12
	JUMLAH	496.700.000	462.570.000	93,12

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja outcome 90 %, yang mempunyai makna baik.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.



Urusan wajib Bidang Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

3. Program Pemanjapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

Sasaran : terselenggaranya pelayanan perijinan terpadu yang prima, tepat waktu, tepat biaya dan transparan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program tersebut :

3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi/Validasi, Visitasi Lapangan dan Administrasi/Teknis Perizinan.

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.485.000.000,00, yang direalisasikan sebesar Rp. 2.464.484.047,00 dengan realisasi belanja sebesar 99,17%.

Output :

Terlaksananya peninjauan lapangan untuk seluruh sektor perizinan.

Outcome

Meningkatnya kualitas pengelolaan perizinan yang akuntabel pada BPMPT Provinsi Jawa Barat.

Capaian Kinerja :

a. Kinerja Sasaran Strategik

Pencapaian kinerja sasaran strategik meningkatnya kualitas pengelolaan perijinan yang akuntabel, ditandai dengan terlaksananya peninjauan lapangan untuk seluruh sektor perizinan.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi/Validasi, Visitasi Lapangan dan Administrasi/Teknis Perizinan, capaian kinerja Pengelolaan Keuangan sebesar 99,17 %.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang dan Jasa	2.485.000.000	2.464.484.047	99,17



NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
	JUMLAH	2.485.000.000	2.464.484.047	99,17

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja outcome 100%, yang mempunyai makna baik.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.

3.2. Pemantapan Kebijakan dan Sinergitas Stakeholders Perizinan

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 403.850.000,00 yang direalisasikan sebesar Rp. 385.007.127,00 dengan realisasi belanja sebesar 95,33%.

Output :

Terlaksananya FGD Sinergitas Tim Teknis Perizinan.

Outcome

Meningkatnya kualitas pengelolaan perizinan yang akuntabel pada BPMPT Provinsi Jawa Barat.

Capaian Kinerja :

a. Kinerja Sasaran Strategik

Pencapaian kinerja sasaran strategik meningkatnya kualitas pengelolaan perizinan yang akuntabel dengan kategori **Baik**.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Pemantapan Kebijakan dan Sinergitas Stakeholders Perizinan, capaian kinerja Pengelolaan Keuangan sebesar 95,33 %.



NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	6.900.000	6.900.000	100
2	Belanja Barang dan Jasa	396.950.000	378.107.127	95,25
	JUMLAH	403.850.000	385.007.127	95,33

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja outcome 100%, yang mempunyai makna baik.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.

3.3. Penyelenggaraan Layanan Perizinan melalui SMS dan Gerai Wilayah Barat

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 194.320.000,00 yang direalisasikan sebesar Rp. 193.645.000,00 dengan realisasi belanja sebesar 99,00%.

Output :

Terselenggaranya operasional pelayanan perizinan melalui SMS dan Gerai Wilayah Barat secara profesional, akuntabel, normatif, transparan, andal dan santun.

Outcome :

Meningkatnya kualitas pengelolaan perizinan yang akuntabel pada BPMPPT Provinsi Jawa Barat.

Capaian Kinerja :

a. Kinerja Sasaran Strategik

Pencapaian kinerja sasaran strategik meningkatnya kualitas pengelolaan perizinan yang akuntabel dengan kategori **Baik**.

**b. Kinerja Pengelolaan Keuangan**

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perizinan melalui SMS dan Gerai Wilayah Barat, capaian kinerja Pengelolaan Keuangan sebesar 99,00 %.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang dan Jasa	194.320.000	192.376.000	99,00
	JUMLAH	194.320.000	193.645.000	99,00

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja outcome 99,00%, yang mempunyai makna baik.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.

3.4. Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perizinan melalui SMS dan Gerai Wilayah Timur

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 194.549.000,00 yang direalisasikan sebesar Rp. 192.662.000,00 dengan realisasi belanja sebesar 99,03%.

Output :

Terselenggaranya operasional pelayanan perizinan melalui SMS dan Gerai Wilayah Barat secara profesional, akuntabel, normatif, transparan, andal dan santun.

Outcome

Meningkatnya kualitas pengelolaan perizinan yang akuntabel pada BPMPT Provinsi Jawa Barat.

**Capaian Kinerja :**

a. Kinerja Sasaran Strategik

Pencapaian kinerja sasaran strategik meningkatnya kualitas pengelolaan perizinan yang akuntabel dengan kategori **Baik**.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan layanan perizinan melalui SMS dan Gerai wilayah Timur, capaian kinerja Pengelolaan Keuangan sebesar 99,03 %.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang dan Jasa	194.549.000	192.662.000	99,03
	JUMLAH	194.549.000	192.662.000	99,03

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja outcome 99,03 %, yang mempunyai makna baik.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.

3.5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu Jawa Barat

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 211.805.400,00 yang direalisasikan sebesar Rp. 188.249.000,00 dengan realisasi belanja sebesar 88,88%.

**Output :**

Terlaksananya monitoring pelayanan perizinan, tersusunnya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian nilai IKM sebesar 76,44 dalam kategori Baik, terlaksananya koordinasi evaluasi penyelenggaraan perizinan.

Outcome:

menyelaraskan capaian kinerja pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat.

Capaian Kinerja :

a. Kinerja Sasaran Strategik

Pencapaian kinerja sasaran strategik menyelaraskan capaian kinerja pelayanan perijinan terhadap masyarakat dengan kategori **Baik**.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pelayanan Perijinan, capaian kinerja Pengelolaan Keuangan sebesar 88,88 %.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	2.000.000	1.800.000	90,00
2	Belanja Barang dan Jasa	209.805.000	186.449.000	88,86
	JUMLAH	211.805.400	188.249.000	88,88

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja outcome 90 %, yang mempunyai makna baik.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.



4. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

Sasaran :

- a. Meningkatnya kinerja aparatur;
- b. Meningkatnya disiplin aparatur;
- c. Meningkatnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas

Kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program tersebut :

4.1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur pada BPMPT

Kegiatan ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 489.815.000,00 yang direalisasikan sebesar Rp. 474.492.200,00 dengan realisasi belanja sebesar 96,87%.

Output :

Tersedianya uang saku seminar, lokakarya, sosialisasi, rapat kerja, rapat koordinasi, diseminasi, diklat, bimbingan teknis, tersedianya biaya pendaftaran kursus singkat/pelatihan.

Outcome

Meningkatnya kemampuan, kompetensi dan kinerja aparatur BPMPT.

Capaian Kinerja :

- a. Kinerja Sasaran Strategik

Pencapaian kinerja sasaran strategik meningkatnya kemampuan, kompetensi dan kinerja aparatur dengan kategori **Baik**.

- b. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur pada BPMPT, capaian kinerja Pengelolaan Keuangan sebesar 96,87 %.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	6.900.000	6.900.000	100
2	Belanja Barang dan Jasa	482.915.000	467.592.200	96,82



NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
	JUMLAH	489.815.000	474.492.200	96,87

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja outcome 100%, yang mempunyai makna baik.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.

5. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

Bertujuan meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur. dengan *sasaran program* yaitu :

- a. Terwujudnya kesejahteraan pegawai untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatnya kualitas aparatur daerah.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program tersebut :

5.1. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

Alokasi dana APBD, sebesar Rp. 736.965.000,00, yang direalisasikan sebesar Rp. 728.652.811,00 dengan realisasi input sebesar 98,87 %.

Output :

Terlaksananya kegiatan training for succes, terlaksananya belanja obat-obatan, terlaksananya general check up, tersedianya anggaran untuk sewa lapangan olahraga, terlaksananya pembelian seragam BPMPT dan seragam olahraga, dengan capaian output sebesar 100 %.

Outcome :

Meningkatnya dukungan administrasi dan manajemen untuk meningkatkan kinerja unit-unit kerja BPMPT, yang diukur dari :



Prosentase terpenuhinya fasilitas kesehatan, kesejahteraan karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai. Capaian kinerja 100%, yang mempunyai makna baik.

Capaian Kinerja :

a. Kinerja Sasaran Strategik

Pencapaian kinerja sasaran strategik meningkatnya kesejahteraan aparatur, ditandai dengan terpenuhinya kesejahteraan dan kemampuan untuk mendukung Kinerja Pegawai dengan kategori **baik**.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur, capaian kinerja sebesar 100 %.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	7.600.000	7.600.000	100
2	Belanja Barang dan Jasa	729.365.000	721.052.811	98,86
	JUMLAH	1.005.738.000	948.818.922	94,34

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja 100%, yang mempunyai makna baik.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bertujuan meningkatnya kualitas dan kinerja BPMPT dalam mendukung perbaikan tatakelola pemerintahan daerah yang baik, profesional, afisien, efektif, ekonomis dan akuntabel serta bersih. dengan **sasaran program** yaitu :



a. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SOPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.

b. Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program tersebut :

6.1 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

Alokasi dana APBD, sebesar Rp. 6.036.414.750,00, yang direalisasikan sebesar Rp. 5.772.296.612,00 dengan realisasi input sebesar 95,62%.

Output :

penyediaan administrasi perkantoran berupa ATK, telepon, listrik, internet, dokumentasi kegiatan kedinasan, cetakan formulir-formulir dan penggandaan/fotocopy, materai, spanduk, isi tabung gas, isi air kemasan dan galon, surat kabar, pengiriman surat dan majalah, sewa meja dan kursi, belanja makan minum rapat dan tamu serta belanja perjalanan dinas.

Outcome :

terpenuhinya kebutuhan dasar operasional BPMPT dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.

Capaian Kinerja :

a. Kinerja Sasaran Strategik

Pencapaian kinerja sasaran strategik terselenggaranya administrasi perkantoran, ditandai dengan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan kategori **baik**.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran, capaian kinerja sebesar 95,62 %.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	24.800.000	22.260.000	89,76
2	Belanja Barang dan Jasa	6.011.614.750	5.750.036.612	95,64



NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
	JUMLAH	6.036.414.750	5.772.296.612	95,62

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja 95,62%, yang mempunyai makna **baik**.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran :

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
- b. Tersedianya sarana mobilitas dan peralatan kerja untuk mendukung aksesibilitas kinerja aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program tersebut :

7.1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Alokasi dana APBD, sebesar Rp. 1.335.233.250,00, yang direalisasikan sebesar Rp. 1.227.603.277,00 dengan realisasi input sebesar 91,94%.

Output :

Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai, antara lain: honor panitia pengadaan barang dan jasa, kursi kerja staf, *proyektor/in focus/* alat teleconference, CCTV, mesin penghancur kertas, rak arsip, filling cabinet, AC, papan nama, vacum cleaner, komputer, note book tablet, printer, monitor display, modem internet, meja staf, terlaksananya belanja perlengkapan kantor, peralatan kantor, pengadaan komputer, pengadaan meubeulair, peralatan dapur, alat-alat komunikasi, pengadaan penerangan jalan taman, pengadaan konstruksi.

**Outcome :**

Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pokok dan fungsi aparatur serta pelayanan kepada masyarakat yang memadai, terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Capaian Kinerja :

a. Kinerja Sasaran Strategik

Pencapaian kinerja sasaran strategik tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi aparatur serta pelayanan kepada masyarakat dengan kategori **baik**.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, capaian kinerja sebesar 91,94 %.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	15.300.000	13.500.000	88,24
2	Belanja Barang dan Jasa	103.500.000	41.525.000	40,12
3	Belanja Modal	1.216.433.250	1.172.578.227	96,39
	JUMLAH	1.335.233.250	1.227.603.277	91,94

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja 91,94%, yang mempunyai makna **baik**.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.



8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bertujuan meningkatnya kualitas dan kinerja BPMPT dalam mendukung perbaikan tatakelola pemerintahan daerah yang baik, profesional, efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel serta bersih. *dengan sasaran program yaitu :*

- a. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional SOPD.
- b. Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program tersebut :

8.1 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Alokasi dana APBD, sebesar Rp. 4.707.224.000,00, yang direalisasikan sebesar Rp. 4.469.558.466,00 dengan realisasi input sebesar 94,95 %.

Output :

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor, tersedianya biaya jasa kebersihan, tersedianya biaya jasa keamanan, tersedianya biaya bahan bakar, tersedianya biaya perawatan kendaraan bermotor dan perpanjangan STNK.

Outcome :

Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Capaian Kinerja :

- a. Kinerja Sasaran Strategik
Pencapaian kinerja sasaran strategik meningkatnya dukung sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ditandai dengan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor yang baik.
- b. Kinerja Pengelolaan Keuangan
Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, capaian kinerja sebesar 94,95 %.



NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	124.584.000	123.084.000	98,8
2	Belanja Barang dan Jasa	4.582.640.000	4.346.474.466	94,8
	JUMLAH	4.707.224.000	4.469.558.466	94,95

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja 94,95 %, yang mempunyai makna baik.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.

9. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Bertujuan meningkatnya kinerja pengelola keuangan di lingkungan BPMPT Provinsi Jawa Barat, dengan *sasaran program* yaitu :

1. Terwujudnya restrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pembangunan;
3. Meningkatnya pendapatnya daerah;
4. Meningkatnya penataan dan pendayagunaan asset milik pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten dan Kota;
5. Meningkatnya pengelolaan asset daerah.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program tersebut :

9.1. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Alokasi dana APBD, sebesar Rp. 94.000.000,00, yang direalisasikan sebesar Rp. 88.343.300,00 dengan realisasi input sebesar 93,98 %.

Output :

pelaporan keuangan menggunakan SIPKD untuk mempertahankan predikat WTP Jawa Barat.

**Outcome :**

Meningkatnya kinerja pengelola keuangan di lingkungan BPMPT Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertahankan penilaian WTP dari BPK.

Capaian Kinerja :

a. Kinerja Sasaran Strategik

Pencapaian kinerja sasaran strategik Meningkatnya kinerja pengelola keuangan di lingkungan BPMPT Provinsi Jawa Barat ditandai dengan Meningkatnya kinerja pengelola keuangan di lingkungan BPMPT Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertahankan penilaian WTP dari BPK.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, capaian kinerja sebesar 93,98 %.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang dan Jasa	94.000.000	88.343.300	93,98
	JUMLAH	94.000.000	88.343.300	93,98

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja 93,98%, yang mempunyai makna **baik**.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.



10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Bertujuan tersusunnya perencanaan, evaluasi, dan pelaporan internal SOPD.

dengan **sasaran program** yaitu :

- a. Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD.
- b. Tersedianya dokumen operasional SKPD yang mendukung capaian kinerja organisasi

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program tersebut :

10.1. Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Alokasi dana APBD, sebesar Rp. 95.000.000,00, yang direalisasikan sebesar Rp. 95.000.000,00 dengan realisasi input sebesar 100 %.

Output :

penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, tersusunnya RKT 2015, DPA 2015, DPPA 2015, RKA 2016, LAKIP 2015, Perjanjian Kinerja 2015, bahan LKPJ dan LPPD 2015, Renja 2016.

Outcome :

Meningkatnya daya dukung administrasi perencanaan dan pelaporan untuk meningkatkan pelayanan serta menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Capaian Kinerja :

- a. Kinerja Sasaran Strategik

Pencapaian kinerja sasaran strategik tersusunnya perencanaan, evaluasi, dan pelaporan internal SOPD, ditandai dengan :

- Tersusunnya Dokumen RKT 2015, capaian kinerja 100% dengan makna **baik**.
- Tersusunnya Dokumen DPA 2015, capaian kinerja 100% dengan makna **baik**.
- Tersusunnya Dokumen DPPA 2015, capaian kinerja 100% dengan makna **baik**.
- Tersusunnya Dokumen RKA 2016, capaian kinerja 100% dengan makna **baik**.



- Tersusunnya Dokumen LAKIP 2015, capaian kinerja 100% dengan makna **baik**.
- Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja 2015, capaian kinerja 100% dengan makna **baik**.
- Tersusunnya Bahan LKPJ dan LPPD 2015, capaian kinerja 100% dengan makna **baik**.
- Tersusunnya Dokumen Renja 2016, capaian kinerja 100% dengan makna **baik**.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, capaian kinerja sebesar 100 %.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000	95.000.000	100
	JUMLAH	95.000.000	95.000.000	100

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja 100%, yang mempunyai makna **baik**.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.

**Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika****11. Program Pengembangan Komunikasi, informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Sasaran :

Kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program tersebut :

10.1 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan

Alokasi dana APBD, sebesar Rp. 163.600.000,00, yang direalisasikan sebesar Rp. 158.700.000,00 dengan realisasi input sebesar 97,00 %.

Output :

tersedianya aplikasi dan database perizinan secara online.

Outcome :

Terintegrasinya database perizinan ke dalam aplikasi perizinan secara online.

Capaian Kinerja :**a. Kinerja Sasaran Strategik**

Pencapaian kinerja sasaran strategik meningkatnya terintegrasinya database perizinan ke dalam aplikasi perizinan secara online dengan kategori **baik**.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perijinan, capaian kinerja sebesar 100 %.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	5.400.000	5.400.000	100
2	Belanja Barang dan Jasa	158.200.000	153.300.000	96,90
	JUMLAH	163.600.000	158.700.000	97.000



Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja 97 %, yang mempunyai makna **baik**.

Permasalahan dan solusi :

tidak ada.

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

12. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran : Ketersediaan dokumen perencanaan daerah (spasial dan sektoral).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program tersebut :

12.1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan

Kegiatan ini dengan Alokasi dana APBD, sebesar Rp. 920.000.000,00, yang direalisasikan sebesar Rp. 915.292.000,00 dengan realisasi input sebesar 99,49%.

Output :

terlaksananya Forum Sinergitas Kelembagaan Penanaman Modal; tersusunnya Renstra BPMPT Provinsi Jawa Barat; tersusunnya Profil BPMPT Provinsi Jawa Barat, tersusunnya SOP BPMPT Provinsi Jawa Barat; terlaksananya keikutsertaan BPMPT pada kegiatan Pra Musrenbang, Musrenbang dan Musrenbangnas; KP3MN di Surabaya, Sosialisasi Program Kegiatan BKPM di Padang; terlaksananya evaluasi dan monitoring program/kegiatan penanaman modal.

Outcome :

Terwujudnya sinergitas perencanaan promosi dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan kabupaten/kota.

Capaian Kinerja :

a. Kinerja Sasaran Strategik

Pencapaian kinerja sasaran strategik terlaksananya Forum Sinergitas Kelembagaan Penanaman Modal; tersusunnya Renstra BPMPT Provinsi Jawa Barat; tersusunnya Profil BPMPT Provinsi Jawa Barat, tersusunnya SOP BPMPT Provinsi Jawa Barat; terlaksananya keikutsertaan BPMPT pada



kegiatan Pra Musrenbang, Musrenbang dan Musrenbangnas; KP3MN di Surabaya, Sosialisasi Program Kegiatan BKPM di Padang; terlaksananya evaluasi dan monitoring program/kegiatan penanaman modal, capaian Kinerja sebesar 99,49 % yang mempunyai makna Baik, ditandai dengan :

- Terselenggaranya Forum Sinergitas Kelembagaan Penanaman Modal. Capaian kinerja 100%, yang mempunyai makna **baik**.
- Terlaksananya evaluasi dan monitoring program/kegiatan Penanaman Modal, capaian kinerja 100%, yang mempunyai makna **baik**.
- Terlaksananya peran aktif BPMPT dalam kegiatan KP3MN, Musrenbang, capaian kinerja 100% yang mempunyai makna **baik**.

b. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan (LKPK) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, Prosentase pencapaian kinerja kegiatan pada Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan, capaian kinerja sebesar 99,49 %.

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN TARGET %
1	Belanja Pegawai	33.600.000	33.600.000	100
2	Belanja Barang dan Jasa	886.400.000	881.692.000	99,47
	JUMLAH	920.000.000	915.292.000	99,49

Pelaksanaan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja outcome 99,49%, yang mempunyai makna baik.

Permasalahan dan solusi :

Tidak ada



3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.

Sebagaimana yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, bahwa penyelenggaraan urusan wajib pada bidang penanaman modal oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat yang merupakan sebagai OPD utama dalam meningkatnya jumlah investasi dan sebagai OPD mitra pendukung dalam meningkatnya jumlah lapangan kerja. Serta sebagai OPD mitra pendukung berperan meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan melalui urusan wajib Bidang Statistik. Selain itu BPMPT Provinsi Jawa Barat sebagai OPD mitra pendukung berperan dalam meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui urusan wajib bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian terutama dalam pelayanan perijinan kepada masyarakat.

No.	Urusan Wajib	Nama unit kerja Pelaksana
I.	Bidang Penanaman Modal	BPMPT
1.	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	BPMPT
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN	Bidang Pengendalian
	Kegiatan Penanganan Permasalahan Penanaman Modal di Jawa Barat	Bidang Pengendalian
	Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Investasi	Bidang Penanaman Modal
	Kegiatan Pengembangan Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi	Bidang Sosialisasi dan Promosi
	Kegiatan Publikasi Kawasan Geopark Ciletuh	Bidang Sosialisasi dan Promosi
II.	Bidang Statistik	BPMPT



No.	Urusan Wajib	Nama unit kerja Pelaksana
2.	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah.	BPMPPT
	Kegiatan Pengelolaan Data/Informasi dan Publikasi Perizinan/Non Perizinan di Jawa Barat	Bidang Pengendalian
III.	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BPMPPT
3.	Program Pemantapan Otonomi Daerah	BPMPPT
	Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi/Validasi, Visitasi Lapangan dan Administrasi/Teknis Perizinan	Bidang Pelayanan Perijinan
	Kegiatan Pemantapan Kebijakan dan Sinergitas Stakeholders Perizinan	Bidang Pelayanan Perijinan
	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perizinan melalui SMS dan Gerai Wilayah Barat	Bidang Pelayanan Perijinan
	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perizinan melalui SMS dan Gerai Wilayah Timur	Bidang Pelayanan Perijinan
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu Jawa Barat	Bidang Pengendalian
	Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan di Jawa Barat	Bidang Sosialisasi dan Promosi
4.	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur	BPMPPT
	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur pada BPMPPT	Sekretariat
5.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	BPMPPT



No.	Urusan Wajib	Nama unit kerja Pelaksana
	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Sekretariat
6.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPMPT
	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Sekretariat
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPMPT
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat
8.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	BPMPT
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat
9.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	BPMPT
	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sekretariat
10.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPMPT
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sekretariat
IV.	Bidang Komunikasi dan Informatika	BPMPT
11.	Program Pengembangan Komunikasi, informasi, media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi	BPMPT
	Kegiatan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perijinan	Sekretariat
V.	Bidang Perencanaan Pembangunan	BPMPT



No.	Urusan Wajib	Nama unit kerja Pelaksana
11.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BPMPT
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Program/ Kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan	Sekretariat

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Kondisi sampai dengan akhir bulan Desember 2016 pejabat struktural sebanyak 15 orang, pejabat fungsional 3 orang dan pejabat non struktural sebanyak 114 orang (34 orang di Sekretariat, 43 orang di Bidang Pelayanan Perijinan, 11 orang di Bidang Sosialisasi dan Promosi, 12 orang di Bidang Penanaman Modal, 13 orang di Bidang Pengendalian). Berdasarkan struktur perangkat daerah jumlah pejabat struktural sebanyak 15 orang (seorang Kepala Badan dan satu orang Sekretaris serta 4 (empat). orang Kepala Bidang). Masing-masing kepala Bidang membawahi 2 orang pejabat struktural kecuali Bidang Pelayanan Perijinan, Sekretaris membawahi 3 orang pejabat struktural.

Sepanjang 1 (satu) tahun terakhir, jumlah pegawai organik yang terdiri dari PNS dan CPNS di lingkup BPMPT Provinsi Jawa Barat terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru maupun pensiun. Hingga akhir tahun 2016, jumlah pegawai BPMPT Provinsi Jawa Barat mencapai 132 orang, dengan kualifikasi kompetensi pada struktur pendidikan formal tingkat jenjang SD sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak 7 orang, jenjang SLTA sebanyak 38 orang, jenjang D-III sebanyak 5 orang, jenjang Strata 1 sebesar 47 orang, jenjang Strata 2 sebanyak 32 orang, dan jenjang Strata 3 sebanyak 2 orang.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan pagu anggaran didalam DPPA tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 39.844.083.563,00 dan yang terserap dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 38.076.411.728,00 atau prosentase capaian target 95,56 %, sisa anggaran sebesar 4,44 % seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Jawa Barat.



- Akuntabilitas keuangan daerah terhadap belanja langsung rencana anggaran belanja sebesar Rp. 25.507.613.075,00 realisasi belanja terserap Rp. 23.983.341.975,00 atau prosentase capaian target sebesar 94,02 %.
- Akuntabilitas keuangan daerah terhadap belanja tidak langsung (Gaji & Tunjangan) rencana belanja Rp. 17.573.446.700,00 realisasi terserap Rp. 15.000.468.505,00 atau prosentase capaian target sebesar 85,36 %.

Dari implementasi tugas pokok dan fungsi Badan dikaitkan dengan anggaran tersebut, realisasi anggaran Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah :

Uraian		Rencana Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Prosentase Capaian Target (%)
Belanja APBD		39.844.083.563	38.076.411.728	95,56
1	Belanja Tidak Langsung	17.631.309.163	16.644.346.467	94,40
	• Belanja Pegawai	17.631.309.163	16.644.346.467	94,40
2	Belanja Langsung	22.212.774.400	21.432.095.261	96,48
	• Belanja Pegawai	305.900.000	292.860.000	95,73
	• Belanja Barang & Jasa	20.690.441.150	19.966.656.984	96,50
	• Belanja Modal	1.937.563.150	1.887.643.889	97,4

Pelaksanaan program dan Kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja outcome 90 %, yang mempunyai makna baik.

6. Proses Perencanaan Pembangunan.

Proses Perencanaan Pembangunan terhadap program kerja dilakukan bersama-sama diseluruh jajaran lingkungan BPMPT Provinsi Jawa Barat yang kompeten dan berkualitas. Dalam perumusannya diadakan dialog interaktif dengan mengedapankan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya baik internal dan eksternal yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan daerah Jawa Barat.



Pelibatan seluruh jajaran unit kerja ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki, sehingga hasil proses perencanaan pembangunan terhadap kegiatan ini selaras dengan program pembangunan daerah Jawa Barat melalui musyawarah, koordinasi yang baik dan harmonis dalam penetapan keputusan penyusunan perencanaan pembangunan program kerja yang mengarah membantu Gubernur Jawa Barat dalam mewujudkan "Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua". Berikut Manajemen strategik keselarasan proses penyusunan Renstra BPMPT Provinsi Jawa Barat dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya).

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan sudah mencukupi.

8. Permasalahan dan solusi.

Tidak ada.

9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

Tidak ada.

C. Prioritas Urusan Pilihan yang dilaksanakan.

Tidak ada prioritas urusan pilihan yang dilaksanakan BPMPT Provinsi Jawa Barat.

D. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci dibuat dalam rangka EKPPD terhadap LPPD tahun 2016, dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Tataran Pengambil Kebijakan.

Indikator kinerja kunci dari aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Aspek : Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu pada urusan wajib Bidang penanaman modal, fokus terhadap daya saing daerah.



Indikator kinerja kunci : jumlah realisasi investasi.

Capaian kinerja :

Jumlah realisasi ijin investasi dalam tahun 2016 adalah

- Dari data realisasi investasi dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan non LKPM berjumlah 38.057 proyek (PMA = 5.923, PMDN = 32.134) dengan nilai investasi Rp. 143,044 Trilyun (PMA = 74,99 Trilyun, PMDN = 68,05 Trilyun)
- Dari data minat investasi dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berjumlah 2.238 proyek (PMA = 740, PMDN = 1498) dengan nilai investasi Rp. 265,2 Trilyun (PMA = 150,3 Trilyun, PMDN = 114,9 Trilyun)

2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum.

Dilihat dari aspek pelaksana kebijakan (BPMPT Provinsi Jawa Barat) terhadap Bidang Administrasi Umum, terdapat 8 (delapan) aspek sebagai berikut :

(1) Kebijakan Teknis penyelenggara urusan pemerintahan

- Fokus : Program Nasional

(yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

Indikator Kinerja Kunci :

- (1) Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD

Capaian Kinerja :

- Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% = (1 : 1) x 100% = 100%
- Fokus : Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPNK

Indikator Kinerja Kunci :

- (2) Keberadaan Standar Operational Procedure (SOP)

Capaian Kinerja :

- Ada Standar Operational Procedure (SOP)

(2) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

- Fokus : Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)



Indikator Kinerja Kunci :

- (3) Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

Capaian Kinerja :

- Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% = $(2 : 2) \times 100\% = 100\%$

- (3) Penataan kelembagaan daerah

- Fokus : Pengisian Struktur Jabatan
 - (4) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
 - (5) Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Capaian Kinerja :

- Struktur jabatan dan eselonering yang terisi sebesar = 15
- Ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD, sebanyak 1 orang arsiparis.

- (4) Pengelolaan Kepegawaian Daerah

- Fokus : Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

Indikator Kinerja Kunci :

- (6) Rasio PNS Provinsi
- (7) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
- (8) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Capaian Kinerja

- Jumlah PNS SKPD terhadap total PNS Provinsi x 100%
= $(133 : 12.635) \times 100\% = 1,053\%$
- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
= $(15 : 15) \times 100\% = 100\%$.
- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% = $(15 : 15) \times 100\% = 100\%$.

Indikator Kinerja Kunci :



(5) Perencanaan Pembangunan Daerah

- Fokus : Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

Indikator Kinerja Kunci :

(9) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD

-RENSTRA SKPD

-RENJA SKPD

-RKA-SKPD

-RKT SKPD

Capaian Kinerja :

Ada 4 dokumen perencanaan SKPD (Renstra BPMPT, Renja BPMPT, RKA BPMPT dan RKT BPMPT)

- Fokus : Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP

Indikator Kinerja Kunci

(10) Jumlah Program RKPDP yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

Capaian Kinerja :

Jumlah Program RKPDP yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% = 0 %

- Fokus : Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

Indikator Kinerja Kunci :

(11) Jumlah Program RENJA RKPDP yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD

Capaian Kinerja

Jumlah Program RENJA RKPDP yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD ; = 0 %

- Fokus : Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

Indikator Kinerja Kunci

(12) Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD



Capaian Kinerja

Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD

$0 \times 100 \% = 0 \%$

(6) Pengelolaan Keuangan Daerah

- o Fokus : Alokasi anggaran

Indikator Kinerja Kunci :

(13) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

Capaian Kinerja :

Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% =

$(Rp. 39.844.083.563 : Rp. 29.493.210.807.883) \times 100\% = 0,135 \%$.

- o Fokus : Besaran belanja modal

Indikator Kinerja Kunci :

(14) Belanja modal terhadap total belanja SKPD

Capaian Kinerja :

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% = $(Rp. 1.937.563.150 :$

$Rp. 39.844.083.563) \times 100\% = 4,86 \%$

- o Fokus : Besaran belanja pemeliharaan

Indikator Kinerja Kunci

(15) Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

(16) Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

Capaian Kinerja :

- o Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% = $(Rp. 4.707.224.000 : Rp. 20.690.441.150) \times 100\% = 22,75 \%$.

- o Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% = $(Rp. 4.707.224.000 : Rp. 39.844.083.563) \times 100\% = 11,81 \%$.

- o Fokus : Laporan keuangan SKPD

Indikator Kinerja Kunci :

(17) Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)

Capaian Kinerja :

Komponen yang ada : LRA, Neraca, Calk



(7) Pengelolaan Barang Milik Daerah

- o Fokus : Manajemen aset SKPD

Indikator Kinerja Kunci

(18) Keberadaan inventarisasi barang atau aset BPMPT

Capaian Kinerja :

Ada inventarisasi barang atau aset SKPD

- o Fokus : Penggunaan Asset SKPD

Indikator Kinerja Kunci

(19) Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD

Capaian Kinerja :

Jumlah Asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100% = $(0 : 832 \text{ m}^2) \times 100 \% = 0 \%$.

(8) Pemberian Fasilitas terhadap partisipasi masyarakat,

- o Fokus : bentuk - bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat

Indikator Kinerja Kunci

(20) Jumlah fasilitas/prasarana Partisipasi : Papan pengumuman, pos pengaduan, leaflet, mobil keliling, pengumuman di mass media.

Capaian Kinerja :

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi = Papan pengumuman (1), Pos pengaduan (1), Leaflet (1), Mobil Keliling (1), Website (1).

- o Fokus : Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

Indikator Kinerja Kunci

(21) - Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat

- Adanya laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pelayanan perijinan
- Adanya laporan pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan

Capaian Kinerja :

- o Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik = ada.
- o Jumlah ijin dan non ijin yang dikelola (pelaksanaan pelayanan perijinan sebanyak 21 bidang perijinan yang dikelola, ijin masuk 21.653, ijin selesai 17.253, dalam proses 3.972)



- o Prosentase jumlah jenis perijinan yang aktif (ada permohonan perijinan) terhadap jumlah jenis perijinan sesuai kewenangan (40,61%)

3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan.

Indikator kinerja kunci dari tataran pelaksana kebijakan aspek capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib Bidang Penanaman Modal untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kunci :

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

(data dari IUT, SPPM (baru), dan LKPM)

Capaian kinerja :

Rumus capaian kinerja :

Prosentase peningkatan Nilai Realisasi LKPM dan Non LKPM PMDN sebesar 0,09 %

Prosentase peningkatan minat realisasi PMDN sebesar 61,2 %